

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Algra, N.E., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Ansori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Djojodihardjo, M.A., Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi, Cetakan Ke 9*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 12*, Djambatan, Jakarta.
- Khaerandy, Ridwan, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia*, Majalah Unisa UII, Yogyakarta.
- Khaerandy, Ridwan, 2004, *Hukum Alih Teknologi, Modul II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Lubis, M.Y dan Lubis, Rahim.A, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan, A.P. 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama, CV Bandar Maju, Bandung.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Sumur, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____ & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet Ke 2*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian Cetakan ke IV*, Pembimbing Masa, Jakarta
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina cipta, Bandung.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutendi, Adrian, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek voor Indonesie) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1384).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Tesis

Krisna Muslim, Hersa, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah “Pura-Pura” (*Schijn Handeling*): Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G/2009.PN.BTL”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Noor Aditama, Purna, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Novianty, Eva, “Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.